

DINAMIKA KEBIJAKAN AUSTRALIA TERHADAP CHINA PASCA AUKUS: ANTARA KEAMANAN NASIONAL DAN KETERGANTUNGAN EKONOMI

Roy Setiawan¹, Lutfia Agustiani², M. Supriyadi³, Valenda Pratiwi⁴,
^{1,2,3,4} Universitas Sriwijaya, Indonesia

¹roysetiawan@fisip.unsri.ac.id, ²lutfiaagustiani8@gmail.com,

³supriyadi041204@gmail.com, ⁴valendapратиwi@gmail.com.

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v5i1.4408>

Received: 4 Mei 2025

Revised: 14 Mei 2025

Accepted: 14 Mei 2025

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika politik Australia dalam menghadapi Tiongkok sejak pembentukan Aliansi Keamanan AUKUS pada tahun 2021. Sementara itu, Australia memperluas kerja sama keamanannya dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk menghadapi kemungkinan ekspansi militer Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Dengan berpartisipasi dalam AUKUS, Australia dapat memperoleh akses ke teknologi pertahanan canggih dan memperkuat posisi strategisnya dalam persaingan di antara negara-negara besar. Sebaliknya, Australia juga mempertahankan hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok, salah satu mitra dagang utamanya dalam hal mineral strategis. Studi ini menggunakan kepentingan nasional dan complex interdependensi untuk menganalisis dilema strategis yang harus dihadapi Australia, dan menunjukkan perlunya menjaga keamanan nasional tanpa membahayakan hubungan ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa Australia telah mengadopsi strategi pragmatis untuk meningkatkan jaminan keamanan dan mempertahankan hubungan diplomatik dan ekonomi yang stabil dengan Tiongkok. Pendekatan ini mendukung upaya Australia untuk mempertahankan otonomi strategisnya dalam lingkungan geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompleks.

Kata Kunci: AUKUS, Kepentingan Nasional, Interdependensi Kompleks, Indo-Pasifik

Abstract

This article discusses Australia's political dynamics in dealing with China since the formation of the AUKUS Security Alliance in 2021. Meanwhile, Australia is expanding its security cooperation with the United States and the United Kingdom to counter China's possible military expansion in the Indo-Pacific region. By participating in AUKUS, Australia can gain access to advanced defense technologies and strengthen its strategic position in the competition among major powers. Conversely, Australia maintains strong economic ties with China, one of its major trading partners in terms of strategic minerals. This study uses national interest concerns and complex interdependence to analyze the strategic dilemma Australia has to face, and points out the need to maintain national security without jeopardizing economic relations. The findings show that Australia has adopted a pragmatic strategy to enhance security guarantees and maintain stable diplomatic and economic relations with China. This approach supports Australia's efforts to maintain its strategic autonomy in an increasingly complex Indo-Pacific geopolitical environment.

Keywords: AUKUS, National Interest, Complex Interdependence, Indo-Pacific.

PENDAHULUAN

Transisi menuju diplomasi resmi antara Australia dan China dimulai pada tahun 1909, ketika pemerintah Persemakmuran Australia membuka kantor konsuler di Beijing. Ini merupakan sebuah langkah awal yang menandai pengakuan secara administratif dari pemerintah Australia terhadap entitas pemerintahan Tiongkok kala itu. Seiring dengan pergeseran politik global dan meningkatnya pengakuan terhadap Republik Rakyat Tiongkok, pada tahun 1972 pemerintah Australia secara resmi mengakui Beijing sebagai wakil sah pemerintahan Tiongkok dan menandatangani nota hubungan diplomatik penuh (Au-Yeung, Keys, & Fischer, 2012). Pengakuan ini tidak hanya menandai perubahan paradigma kebijakan luar negeri Canberra dari orientasi tradisional di kawasan Atlantik menuju keterlibatan yang lebih intens di Asia, melainkan juga membuka ruang dialog strategis dan mekanisme kerjasama kedua negara di bidang ekonomi, pendidikan, serta pertukaran budaya yang hingga kini terus mengalami perluasan dan pendalaman.

Salah satu tonggak penting dalam hubungan ekonomi bilateral kedua negara ditandai dengan ditandatanganinya China–Australia Free Trade Agreement (ChAFTA) pada tahun 2015 guna membangun hubungan komersial antara kedua negara dengan mengamankan pasar Tiongkok dan mengamankan akses perdagangan dari Australia dalam bidang jasa, barang dan juga investasi. Perjanjian tersebut memberikan landasan hukum dan kelembagaan yang memperkuat integrasi ekonomi kedua negara, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi sektor ekspor dan impor masing-masing pihak. Perjanjian ini memungkinkan lebih dari sepertiga dari seluruh barang ekspor dari Australia mendapatkan keuntungan bebas

bea karena Tiongkok adalah pasar utamanya (Australian Government, 2018). Sebagai hasil dari perjanjian tersebut, Tiongkok menjelma menjadi mitra dagang utama Australia dalam berbagai sektor strategis. Data tahun 2023 mencatat bahwa Jumlah ekspor Australia ke Tiongkok adalah yang paling besar, Jumlah ini mencapai US\$ 120,2 juta. Komoditas utama yang di ekspor Australia mencakup bijih besi, batubara, gas alam cair, emas, sereal, minyak bumi, pupuk kasar dan daging (Comtrade UN, 2023). Di sisi lain, Australia juga bergantung pada Tiongkok sebagai sumber utama barang-barang manufaktur, termasuk produk tekstil, peralatan elektronik, serta peralatan telekomunikasi. Pola hubungan dagang ini mencerminkan karakteristik interdependensi kompleks antara kedua negara, di mana kepentingan ekonomi tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari dinamika politik dan keamanan kawasan yang lebih luas.

Australia dan Tiongkok memiliki hubungan yang erat tidak hanya di bidang ekonomi, seperti yang disebutkan Australia dalam *White Book* pertahanan Australia tahun 2016, bahwa Australia dan Tiongkok telah membangun hubungan pertahanan yang produktif berdasarkan pada dialog Strategis Pertahanan Australia-Tiongkok yang dilakukan setiap tahun. Dialog ini membahas mengenai pertukaran tingkat kerja, diskusi kebijakan strategis, latihan praktis, kondisi maritim dan juga pemeliharaan perdamaian. Bahkan pada tahun 2014, Australia, Tiongkok dan juga Amerika Serikat pernah melakukan latihan militer dan teritori bersama (Australia Department of Defence, 2016). Namun, beberapa kritik Australia terhadap penanganan Covid-19 hingga larangan teknologi komunikasi 5G Tiongkok di Australia terjadi karena kekhawatiran Pemerintah Australia terhadap masalah keamanan juga memperpanas hubungan

keamanan antara kedua negara. Hubungan kedua negara selama beberapa dekade terakhir mengalami pasang surut bahkan seringkali mengalami ambivalen. Namun ketergantungan Australia terhadap Tiongkok, pengaruh Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik hingga klaim pemimpin regional oleh Tiongkok memunculkan kewaspadaan Australia terhadap dominasi Tiongkok di kawasan.

Salah satunya bukti nyata kewaspadaan ini dapat ditinjau pada saat penandatanganan perjanjian keamanan antara China dan Kepulauan Solomon yang merupakan tetangga dekat Papua Nugini. Australia yang sejak lama telah memandang Papua Nugini dan negara-negara di kepulauan Pasifik sebagai mitra strategisnya meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga pengaruhnya di Kawasan. Untuk menanggapi tersebut pemerintah Australia mengamankan posisinya dengan menandatangani perjanjian keamanan baru dengan Papua Nugini dan juga mengunjungi negara-negara Pasifik hingga berhasil menandatangani perjanjian keamanan dengan Vanuatu (Moserby, 2023). Langkah defensif pemerintah Australia terhadap Tiongkok ini menunjukkan keinginannya yang besar untuk tetap dapat menjadi negara yang mendominasi di kawasan.

Di tengah dominasi China di pasifik yang dicurigai Australia sebagai upaya perluasan kekuatan Tiongkok di bidang keamanan, Australia telah lama menjalin kerjasama keamanan dengan kekuatan besar lain di dunia yaitu Amerika Serikat. Bahkan sejak masa perang dingin baik secara bilateral maupun multilateral. Australia terlibat di berbagai perjanjian dengan Amerika seperti ANZUS (Perjanjian Keamanan Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat), AUSMIN (Konsultasi Tingkat Menteri Australia-Amerika Serikat), dan juga *Five Eyes Intelligence Alliance*. Hingga kemudian pada 2021

AUKUS hadir sebagai strategi penguatan dan perluasan dari Kerjasama yang sebelumnya sudah terjalin erat antara kedua negara.

Keamanan adalah kebutuhan mutlak dari suatu negara untuk dapat terus bertahan dalam kontestasi geopolitik. Dalam konteks Australia, negara ini tidak memiliki cukup kepercayaan diri dan kapabilitas untuk menjaga keamanannya sendiri. Sejarah panjang dengan Kerajaan Inggris membiasakan Australia untuk terus bergantung kepada kekuatan yang lebih besar.

Pada 2021 fase baru AS dan Inggris sebagai mitra lama mengumumkan aliansi strategis baru dalam AUKUS. Ketiga negara diikat dalam sebuah aliansi pertahanan bertujuan untuk memperdalam kerja sama diplomatik, keamanan, dan pertahanan antara ketiganya (Corben, Ashley & Patton, 2021). Secara signifikan kawasan Asia-Pasifik atas tantangan keamanan yang tumbuh meresponnya dengan membentuk aliansi (Defence Ministers Australian Government, 2021). Tiongkok tidak secara eksplisit disebutkan sebagai ancaman dalam aliansi ini. Namun Australia sepakat bahwa aliansi ini dibentuk untuk membendung ancaman Tiongkok.

Meskipun hubungan ekonomi antara Australia dan Tiongkok berkembang pesat, dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik justru menciptakan ketegangan yang tidak dapat diabaikan. Di satu sisi, Australia sangat bergantung pada Tiongkok sebagai mitra dagang utama, namun di sisi lain, kekhawatiran terhadap ekspansi kekuatan militer dan politik Tiongkok di kawasan mendorong Australia untuk mempererat aliansi keamanan seperti AUKUS bersama Amerika Serikat dan Inggris. Konteks ini memperlihatkan dilema strategis yang dihadapi Australia dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonominya dengan kebutuhan akan keamanan nasional.

Berdasarkan situasi tersebut, pertanyaan yang menjadi fokus dalam artikel ini adalah: Bagaimana Australia dapat menyeimbangkan kepentingan keamanannya dengan kebutuhan ekonominya terhadap Tiongkok? Penulis mencoba mendalami fenomena ini menggunakan perspektif konsep *National Interest* dan *Complex Interdependence*. Penulis berharap, dengan membedah dinamika hubungan Australia–Tiongkok melalui sudut pandang *National Interest* dan *Complex Interdependence*, tulisan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi diplomasi Australia dalam menghadapi tantangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, serta implikasinya terhadap stabilitas regional dan masa depan hubungan kedua negara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap dinamika kebijakan luar negeri Australia terhadap Tiongkok pasca pembentukan aliansi keamanan AUKUS, khususnya dalam konteks hubungan antara kepentingan keamanan nasional dan ketergantungan ekonomi. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks secara komprehensif dan kontekstual, dengan menekankan pada interpretasi makna, serta dinamika hubungan antarnegara yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber sekunder yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi literatur akademik seperti jurnal ilmiah dan buku-buku yang membahas hubungan internasional, kebijakan luar negeri, dan teori-teori politik global. Selain itu, penulis juga memanfaatkan laporan-laporan resmi

dari lembaga pemerintah, dokumen kebijakan luar negeri Australia, situs web kementerian luar negeri kedua negara, serta berita-berita aktual dari media nasional dan internasional yang kredibel. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya menyusun analisis yang objektif dan berbasis data, sekaligus mempertimbangkan dinamika narasi dan kepentingan yang berkembang dalam relasi bilateral Australia–Tiongkok di era pasca-AUKUS.

Oleh karena itu, guna memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan mendalam terhadap dinamika hubungan antara Australia dan Tiongkok pasca terbentuknya AUKUS, penulis membagi pembahasan ke dalam empat subbagian utama. [1] Analisis mengenai kepentingan nasional Australia setelah bergabung dalam AUKUS, khususnya dilihat melalui perspektif keamanan nasional. [2] Kajian mengenai ketergantungan ekonomi Australia terhadap Tiongkok yang dianalisis dengan pendekatan teori interdependensi. [3] Pembahasan mengenai dilema strategis yang dihadapi Australia dalam menyeimbangkan antara komitmen keamanan dan kepentingan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepentingan Nasional Australia Bergabung dengan AUKUS dalam Perspektif Keamanan

Menurut Umar S. Bakry (2017), kepentingan nasional merupakan peluang dan alat terbaik untuk menganalisis kebijakan luar negeri negara lain, baik yang bersifat bilateral bersahabat maupun yang sedang memanas di antara keduanya atau lebih negara. Hampir semua kegiatan yang menganalisis diplomasi dan kebijakan luar negeri suatu negara menggambarkan isu kepentingan nasional (Bakry, 2019). Sedangkan kata Morgentau (1948) kepentingan nasional adalah tujuan nasional

dari hubungan internasional. Tujuannya di sini adalah kekuasaan. Kekuasaan menciptakan negara berlogika dan berdisiplin.

Konsep ini membuat sebuah negara berpikir dan bertindak secara rasional dan tidak mengubah kebijakan luar negerinya meskipun ada ketidaksepakatan. Konsep ini menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional tidak peduli dengan alasan, usaha, moralitas, dll (Morgenthau & Thomson, 2010). Setelah meninjau beberapa definisi pada bagian sebelumnya, penulis berpendapat dari perspektif neo-rasionalis menekankan peran kekuatan dan keamanan dalam kepentingan nasional. Dengan mempertahankan negaranya atau negara lain dengan cara komunikasi dan mengevaluasi kebijakan suatu negara.

Australia, Amerika Serikat beserta Inggris membentuk sebuah kerjasama dalam bidang keamanan pada september 2021 lalu. Kerjasama ini didorong oleh beberapa motivasi strategis yang saling berkaitan. Salah satu alasannya ialah kekhawatiran terhadap kekuatan militer Tiongkok yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok telah melakukan modernisasi besar-besaran terhadap kapabilitas militernya, termasuk pengembangan armada kapal selam dan peningkatan kehadiran di Laut Tiongkok Selatan serta Selat Taiwan (Utami, 2022). Hal ini dianggap sebagai potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Australia dan tatanan internasional berbasis aturan yang selama ini dijunjung tinggi (Sari, Djemat, & Oktaviani, J. 2025).

Selain itu kawasan Indo-Pasifik mengalami dinamika geopolitik yang kompleks, dengan meningkatnya persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Australia melihat perlunya memperkuat posisi strategisnya melalui aliansi yang dapat memberikan jaminan keamanan dan akses terhadap teknologi militer mutakhir.

AUKUS memberikan Australia kesempatan untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir dan teknologi pertahanan canggih lainnya, yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan deterensinya di kawasan (Sari, Djemat, & Oktaviani, 2025).

Tekanan dari Amerika Serikat sebagai sekutu tradisional juga memainkan peran dalam keputusan Australia untuk bergabung dalam AUKUS. Amerika Serikat mendorong pembentukan aliansi ini sebagai bagian dari strategi untuk menyeimbangkan kekuatan Tiongkok di Indo-Pasifik. Bagi Australia, memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan Inggris melalui AUKUS dianggap sebagai langkah untuk memastikan dukungan keamanan dan mempertahankan posisi strategisnya di tengah persaingan geopolitik yang semakin intens.

Salah satu pilar utama AUKUS adalah pengadaan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Australia berencana untuk membeli setidaknya tiga kapal selam kelas Virginia dari Amerika Serikat pada awal 2030-an (Australian Submarine Agency, 2024). Selain itu, Australia akan bekerja sama dengan Inggris dalam pembangunan kapal selam kelas SSN-AUKUS yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan operasional Angkatan Laut Australia. Proyek ini merupakan bagian dari investasi pertahanan terbesar dalam sejarah Australia, dengan perkiraan biaya mencapai 368 miliar dolar Australia selama 30 tahun ke depan (Deutsche Welle, 2022). Selain pengadaan kapal selam, AUKUS juga mencakup kerja sama dalam pengembangan teknologi pertahanan canggih. Ini meliputi bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, teknologi kuantum, kemampuan bawah laut, hipersonik dan anti-hipersonik, serta peperangan elektronik. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketiga negara anggota AUKUS memiliki keunggulan teknologi

dalam menghadapi tantangan keamanan di masa depan. Sebagai bagian dari implementasi AUKUS, Australia telah memulai pelatihan personel angkatan lautnya dengan mitra dari Amerika Serikat dan Inggris. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Australia memiliki sumber daya manusia yang terampil dalam mengoperasikan dan memelihara kapal selam bertenaga nuklir serta sistem pertahanan canggih lainnya.

Upaya penguatan kapabilitas pertahanan Australia melalui AUKUS tidak hanya mencerminkan ambisi teknologis, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika strategis kawasan. Investasi besar-besaran ini pada akhirnya berakar pada kebutuhan fundamental Australia untuk merespons perubahan lanskap geopolitik. Persepsi ancaman terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik pasca pembentukan aliansi AUKUS tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional Australia yang berakar pada kebutuhan untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan pengaruh strategisnya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Aliansi trilateral ini, yang melibatkan Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, merupakan respons terhadap dinamika keamanan yang berkembang, khususnya terkait dengan ekspansi militer Tiongkok di kawasan.

Dari perspektif kepentingan nasional, AUKUS memberikan Australia akses terhadap teknologi pertahanan canggih, termasuk kapal selam bertenaga nuklir, yang memperkuat kemampuan militernya untuk menghadapi potensi ancaman. Langkah ini sejalan dengan teori realisme dalam hubungan internasional, yang menekankan bahwa negara bertindak untuk memastikan kelangsungan hidup dan keamanannya dalam sistem internasional yang anarkis (Hadiwinata, 2017). Dengan memperkuat aliansi dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Inggris, Australia berupaya menyeimbangkan

kekuatan Tiongkok dan mempertahankan stabilitas regional.

Dari perspektif kebijakan luar negeri, Australia menunjukkan pergeseran dari pendekatan diplomatik yang berfokus pada keseimbangan hubungan ekonomi dengan Tiongkok, menuju pendekatan yang lebih berhati-hati dan realistis terhadap ancaman keamanan di kawasan. Kebijakan ini sejalan dengan strategi diversifikasi hubungan luar negeri Australia, misalnya dengan mempererat kerja sama dengan negara-negara Quad (Amerika Serikat, Jepang, India) serta memperkuat kemitraan dengan ASEAN, untuk mengurangi ketergantungan ekonomi-politik pada Tiongkok (Hanggarini et al., 2024). Sementara itu, pada aspek militer, reorientasi ini tercermin dalam peningkatan anggaran pertahanan Australia, modernisasi alutsista, dan penyusunan doktrin baru yang lebih menekankan pada kesiapan menghadapi kontestasi kekuatan besar di Indo-Pasifik. *White Paper* Pertahanan 2020 dan *Defence Strategic Review* 2023 memperlihatkan bagaimana Australia memposisikan dirinya sebagai aktor kunci dalam menjaga tatanan berbasis aturan (*rules-based order*) di kawasan. Fokus utama kebijakan pertahanannya kini tidak hanya pada perlindungan wilayah nasional, melainkan juga pada proyeksi kekuatan untuk mendukung stabilitas regional di tengah ketidakpastian geopolitik yang meningkat.

Ketergantungan Ekonomi Australia terhadap Tiongkok dalam Perspektif *Complex Interdependensi*

Interdependensi dalam perspektif *Complex Interdependensi* menurut Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye yang ditulis dalam buku *Power and Interdependence: World Politics in Transition* (1977), hubungan yang terjadi antar-negara dan juga aktor-aktor non-negara diartikan sebagai pola ketergantungan dalam

berbagai bidang yang meliputi hubungan ekonomi, lingkungan, hubungan politik, dan budaya. Pendekatan ini mengalihkan fokus Hubungan Internasional yang di dominasi oleh pembahasan mengenai kekuatan militer sebuah negara kepada pendekatan pola interaksi negara di berbagai sektor lain. Dalam konsep *Complex Interdependensi* tidak terdapat keuntungan yang relatif mutlak sehingga ketergantungan ekonomi antarnegara dapat mencegah salah satu pihak untuk secara efektif mengeksploitasi dan mendominasi pihak lain secara politik dalam hubungan antarnegara. Relasi yang terjalin antar negara bersifat timbal balik dan mendorong stabilitas melalui kerjasama (Keohane & Nye, 1977). Hubungan Australia dan Tiongkok dilihat dari perspektif *Complex Interdependence* dapat dianalisis dalam tiga ciri:

Multiple Channels (Banyak Saluran)

Dalam konsep *Complex Interdependence* hubungan internasional tidak hanya berlangsung antara pemerintah negara, namun juga melibatkan banyak saluran komunikasi lainnya. Hubungan yang terjalin mencakup Interaksi antar lembaga pemerintah (trans-pemerintah), dan juga aktor non-negara seperti MNC (*Multinational Corporation*), Organisasi Internasional, Universitas, dan Individu (Transnasional). Dengan adanya banyak jalur komunikasi dan interaksi antar negara hubungan internasional yang terjadi menjadi lebih kompleks dan tidak terbatas kepada kebijakan- kebijakan resmi yang dikeluarkan pemerintah. Keberadaan *Multiple Channels* dapat memperluas partisipasi dalam arena global, mempercepat pertukaran informasi transnasional, semakin bertambahnya aktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri sehingga menciptakan ketergantungan yang saling menguatkan di berbagai sektor dalam hubungan internasional.

Disamping hubungan antar pemerintah Tiongkok-Australia yang telah terjalin baik sejak abad ke-19, peran aktor-aktor non-negara merupakan hal yang sangat krusial dalam terjalinnya hubungan baik antar kedua negara. *Multinational Corporation* (MNC) memegang peranan penting bagi hubungan antara Tiongkok dan Australia, khususnya melalui aktivitas investasi dan juga sebagai jembatan perdagangan kedua negara. *Multinational Corporation* memungkinkan aliran barang, jasa, dan modal terjalin antar kedua negara. Hubungan antar kedua negara melalui MNC melalui perdagangan dan Investasi kedua negara semakin erat terutama semenjak Australia dan China terlibat dalam perjanjian *China-Australia Free Trade Agreement* (ChAFTA) sejak tahun 2015 yang memberikan manfaat besar bagi kedua negara terutama Australia dalam melakukan transaksi perdagangan dan juga menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih besar. Dengan adanya ChAFTA dapat memperkecil bahkan menghapus hambatan tarif dan non-tarif perdagangan kedua negara (Auriel, 2022).

Aspek lain yang mendukung adanya *Multiple Channels* adalah keterlibatan kedua negara dalam Organisasi Internasional, China dan Australia tergabung dalam beberapa organisasi internasional yang berfokus pada kerjasama ekonomi seperti APEC (*Asia-Pacific Economy Cooperation*), G20, RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*), WTO (*World Trade Organization*) dan juga aktif dalam forum PBB serta ikut aktif dalam badan di bawah naungan PBB seperti UNESCO, WHO, dan UNHCR. Bergabungnya kedua negara kedalam organisasi yang sama dapat menciptakan interdependensi karena organisasi dapat membangun hubungan, aturan, dan kepentingan bersama yang membuat kedua negara saling bergantung.

Selain kedua aspek tersebut Universitas dan Individu juga menjadi tolak ukur *Complex Interdependence* dengan ciri *Multiple Channels*. Tiongkok merupakan salah satu negara penyumbang mahasiswa internasional di Australia selain India. Tiongkok merupakan negara dengan penggunaan visa pelajar terbanyak di Australia pada Januari tahun 2025 mencapai 3.573 visa pelajar (Travel and Tour World, 2025). Banyak Universitas dan Lembaga pendidikan di kedua negara mengadakan program magang, studi singkat, dan pertukaran pelajar memperbesar peluang kerjasama akademik dan budaya kedua negara. Program pertukaran mahasiswa internasional antara Tiongkok dan Australia menciptakan hubungan erat antara masyarakat sehingga interdependensi kompleks tercerminkan di dalamnya sebagai individu yang dapat berinteraksi secara lintas negara.

Absense of Hierarchy among Issues

Dalam konsep *Complex Interdependence*, Tidak ada isu yang secara konsisten lebih dominan daripada isu lainnya. Berbeda dengan pendekatan realis yang menempatkan militer sebagai isu utama di atas segalanya, Menurut Keohane dan Nye dalam hubungan internasional modern, isu-isu selain militer seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan budaya dapat menjadi sama pentingnya tergantung pada situasi yang terjadi. Keberagaman kepentingan ini mengharuskan negara untuk mengelola berbagai dimensi hubungan sekaligus dan tidak memprioritaskan sektor tertentu secara tetap.

Hubungan China dan Australia pada masa Covid-19 mengalami kemerosotan akibat kecaman pemerintah Australia kepada China mengenai asal-usul Virus Covid-19. Dinamika hubungan antara Australia-China berlanjut pada tingkat yang

semakin mengkhawatirkan Pasca AUKUS sehingga menimbulkan ketegangan antara kedua negara. Sejak kehadirannya pada tahun 2021, respon Tiongkok terhadap ancaman geopolitik di kawasan Asia-Pasifik ini dapat langsung dirasakan oleh Australia. Tiongkok menerapkan sanksi perdagangan terhadap hampir semua sektor ekspor utama dari Australia seperti jelai, batu bara, dan wine. Selain Sektor perdagangan target potensial dalam tindakan pembatasan Tiongkok adalah kepada sektor Mahasiswa dan internasional dan pariwisata (Martin, 2021). Menanggapi respon negatif Tiongkok pemerintah Australia melakukan pendekatan proaktif terhadap keamanan nasional, dan berusaha untuk tetap dapat mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik. Namun di lain sisi Australia tetap menjaga hubungan Ekonominya dengan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar. Pada November 2023 Perdana Menteri Australia melakukan Pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di sela-sela Konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Indonesia, untuk mencapai kesepakatan dalam hubungan bilateral. Kemudian pada tahun 2024 dalam acara pameran impor Internasional China di Shanghai, Perdana Menteri Australia juga turut menyertai. Perbaikan hubungan kearah yang lebih baik juga tampak pada April 2024, Australia menghentikan pemberlakuan tarif anti-dumping pada produk pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dari China. Dan sebaliknya pemberlakuan tarif pada komoditas seperti wine dan daging dari Australia ke China pun telah diperlonggar (Xinhua, 2024).

Dinamika hubungan antara Australia dan China walaupun dipengaruhi oleh upaya hegemoni di kawasan Asia-Pasifik dan semakin memanas karena keterlibatan pihak eksternal dalam pakta AUKUS. Namun faktor ekonomi dan persahabatan kedua negara yang telah terjalin sejak lama melibatkan berbagai aspek, mengharuskan kedua negara

untuk dapat mengelola berbagai dimensi hubungan sekaligus tanpa memprioritaskan sektor tertentu secara tetap. Dinamika hubungan yang terjadi dapat menciptakan pola yang kompleks sehingga negosiasi dan kompromi merupakan kunci untuk menjaga hubungan yang seimbang.

Minor Role if Military Force

Berkurangnya peran kekuatan militer dalam mengatur hubungan antar negara adalah salah satu ciri utama dari konsep Complex Interdependence, menurut Keohane dan Nye dalam situasi ketergantungan yang tinggi penggunaan militer menjadi tidak efektif dan malah dapat menjadi kontraproduktif, karena dapat merusak hubungan ekonomi atau politik yang sebelumnya sudah terjalin dan saling menguntungkan. Negara-negara cenderung menyelesaikan perselisihan melalui jalur diplomasi, negosiasi, dengan menggunakan lembaga multilateral seperti WTO dan PBB. Sehingga stabilitas nasional dapat dicapai melalui kerjasama ekonomi, pertukaran budaya, dan kolaborasi politik.

Pasca perselisihan Australia dan China pada periode 2019-2021 pada masa covid-19 dan pembentukan AUKUS, Berbagai jenis pembatasan antara China dan Australia mengalami keringanan setelah berbagai upaya negosiasi dan pergantian pemerintahan pada tahun 2022. Salah satu pembatasan yang dilakukan oleh China adalah Pembatasan Impor jelai dari Australia. Pada april 2023, Menteri Luar Negeri Australia menyatakan bahwa negosiasi antara pemerintah Australia dan China telah mencapai kesepakatan. Dimana Sebelumnya pemerintah Australia telah mengajukan keluhan resmi kepada WTO mengenai bea anti-dumping yang diberlakukan China pada Jelai Australia (Ahmad, 2013). Selain itu Australia melakukan kelonggaran terhadap produk

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) asal Tiongkok yang terimbas kebijakan tarif anti-dumping karena dianggap dapat mengganggu pasar dalam negeri Australia, negosiasi mengenai tarif ini diselesaikan oleh Australia dan Tiongkok melalui WTO pada april 2024 (Xinhua, 2024). Negosiasi bilateral antar negara dan juga keberadaan lembaga multilateral dalam hal ini dapat membuktikan bahwa kurangnya penggunaan kekuatan militer dapat menjaga hubungan ekonomi atau politik yang sebelumnya sudah terjalin dan saling menguntungkan

Dilema Strategis: Menyeimbangkan Keamanan Nasional dan Ketergantungan Ekonomi

Ketika kekuatannya tumbuh pesat, China telah mulai menentang dominasi AS di kawasan Asia-Pasifik. Kebangkitan Tiongkok dan perkembangan pertahanan terkait mengkhawatirkan Amerika Serikat. Kehadiran kapal-kapal Tiongkok yang mengejar pantai barat, utara, dan timur Australia juga mengkhawatirkan Australia. Identitas dan kepentingan mempengaruhi pembentukan AUKUS. Australia menghadapi dilema antara rasa tidak aman yang sangat besar terhadap negara-negara tetangganya dan ketidakmampuannya untuk melindungi dirinya sendiri, oleh karena itu Australia selalu beraliansi dengan negara besar seperti Amerika Serikat. Aliansi keamanan Australia adalah untuk pertahanan bersama. Australia dapat berpartisipasi dalam aliansi dan mendapatkan informasi strategis yang berguna untuk pertahanan serta persenjataan dan teknologi canggih (melalui pilar pertama dan kedua dari aliansi AUCUS) (Jaknanihan, 2022).

China telah berkembang menjadi negara dengan perekonomian yang sangat maju kini memiliki pengaruh yang signifikan dalam tatanan politik global.

China dan Australia hanya berjarak 7000 kilometer, namun tindakan agresif China dan kekuatan nuklir China membuat Australia takut. Ketakutan ini terkait erat dengan buruknya hubungan yang terjadi antara Australia dan Cina. Oleh karena itu, sementara hubungan mereka merosot, Australia terus berhati-hati. Australia memblokir Huawei dari infrastruktur 5G pada 2018 karena masalah keamanan negara. Konflik tersebut mencapai puncaknya ketika COVID-19, yang berasal dari China, menyebar ke seluruh dunia. Australia meminta China untuk melakukan investigasi independen terhadap asal muasal virus tersebut, tetapi China merasa bahwa Australia telah bertindak terlalu jauh dan menolak langkah ini. Australia secara aktif mengkritik China dan seolah-olah menganggapnya bertanggung jawab atas insiden ini, yang membuat China marah meskipun mereka telah menyangkal telah menyebabkan pandemi. Pada periode saat ini, China telah menanggukkan produk Australia secara besar-besaran seperti bijih besi, batu bara, gandum, daging sapi, anggur, dan kayu (Okono (2021). Australia menyadari perlu meningkatkan pertahanannya dan dengan cepat.

Namun di bidang ekonomi, Australia dan Cina bekerja sama secara erat. Selama 20 tahun terakhir, Australia sangat bergantung pada pasar Cina. Sebagai contoh, Cina menyumbang 36,7 persen dari pasar ekspor Australia, dengan nilai perdagangan sebesar 100 miliar dolar AS, menjadikan Cina sebagai mitra dagang penting bagi ekspor Australia. Namun, pangsa ini telah menurun selama tujuh tahun terakhir. Antara tahun 2016 dan 2021, serangkaian peristiwa membuat hubungan kedua negara menjadi tegang, bahwa Tiongkok menimbulkan masalah di Indo-Pasifik dan perlu diwaspadai; kemudian Australia meminta Tiongkok untuk menerima arbitrase LTS, yang menjamin kedaulatan Tiongkok. Australia dan Cina telah mendefinisikan hubungan

mereka sebagai kemitraan strategis dengan cakupan yang sangat besar, sementara Australia cenderung berpihak pada Amerika Serikat dalam masalah keamanan dan pertahanan. Menurut pemerintah Australia (2022), kompleksitas politik kedua negara telah terjadi selama hubungan diplomatic.

Kebijakan bergabungnya dalam pakta trilateral AUKUS yang dilakukan oleh Australia tidak lepas dari kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional merupakan cara komunikasi dan mengevaluasi melalui kebijakan luar negeri dalam mempertahankan negaranya atau negara lain. Menurut Tiongkok, Australia sedang mencari peran yang lebih besar dalam urusan keamanannya, yaitu memperkuat aliansi militer dengan Amerika Serikat untuk terlibat dalam di Asia-Pasifik. (Zhaokui, 2014; State Council The People's Republik of China, 2011; State Council Information Office of the People's Republik of China, 2019). Dalam konsep Complex Interdependensi tidak terdapat keuntungan yang relatif mutlak sehingga ketergantungan ekonomi antarnegara dapat mencegah salah satu pihak untuk secara efektif mengeksploitasi dan mendominasi pihak lain secara politik dalam hubungan antarnegara. Dengan kebijakan yang ada keduanya tetap membutuhkan karna china pasar ekspor terbesar Australia dan begitu juga sebaliknya australia mitra dagang utama bagi China.

KESIMPULAN

Penulis menemukan dinamika kompleks antara kepentingan keamanan nasional dan ketegantungan ekonomi tercermin dalam hubungan Australia-Tiongkok pasca AUKUS. Secara khusus, pembentukan AUKUS pada tahun 2021 merupakan bagian dari strategi Australia untuk memperkuat pertahanannya terhadap

potensi ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansi militer Tiongkok di Indo-Pasifik. Keanggotaan Australia di AUKUS memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan Inggris serta memberi mereka akses ke teknologi pertahanan mutakhir, seperti kapal perang bertenaga nuklir. Fokus ini menunjukkan bahwa, dari perspektif kepentingan nasional, Australia menghargai keamanan regional untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas, sejalan dengan pendekatan realistis dalam hubungan internasional. Di sisi lain, Australia masih sangat bergantung pada Cina sebagai mitra dagang utama. Ketergantungan ini mencerminkan sifat saling ketergantungan yang lebih kompleks, contohnya dalam ekspor bijih besi. Interaksi melalui berbagai saluran ini meningkatkan rasa saling curiga, yang merugikan kedua belah pihak dalam konflik terbuka. Terlepas dari memburuknya hubungan akibat ketegangan diplomatik dan perdagangan setelah pandemi COVID-19 dan pembentukan AUKUS, kedua negara telah secara aktif bekerja untuk menormalkan hubungan bilateral, seperti melalui perjanjian perdagangan dan pelonggaran pembatasan. Mengingat meningkatnya persaingan antara negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik, Australia telah memutuskan untuk memperkuat aliansi keamanannya tanpa memutuskan hubungan ekonomi sepenuhnya. Pada kasus ini konsep kepentingan nasional dan saling ketergantungan yang kompleks, bertujuan untuk mempertahankan otonomi strategisnya dengan mengelola ketegangan secara hati-hati, memperkuat kapabilitas militer, dan membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan terhadap hubungan diplomatik Tiongkok pasca AUKUS.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap dinamika hubungan Australia dan Tiongkok, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk menunjang riset lebih lanjut. Riset lebih

mendalam dapat dilakukan untuk meneliti lebih jauh mengenai dampak jangka panjang dari ketegangan geopolitik terhadap hubungan ekonomi kedua negara perlu diperluas, terutama dalam bidang teknologi dan pendidikan tinggi. Untuk itu penulis berharap dengan adanya tulisan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi diplomasi Australia dalam menghadapi tantangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, serta implikasinya terhadap stabilitas regional dan masa depan hubungan kedua negara. Dan dapat dijadikan sebagai referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D., F. (2023). Batal ke WTO, Australia dan Cina Sepakat Selesaikan Sengketa Jelai. Auriel, G. (2022). Faktor Pendukung Terwujudnya China-Australia Free Trade Agreement Antara Tiongkok dan Australia pada tahun 2015. Retrieved 28 04, 2025 <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/15720/Cover%20-%20Bab1%20-%206091801001sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Australian Government. (2018). *ChAFTA outcomes at a glance*. Department of Foreign Affairs and Trade. <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/chafta/factsheets/Pages/chafta-outcomes-at-a-glance>
- Au-Yeung, W., Keys, A., & Fischer, P. (2012, December 12). Australia-China: Not just 40 years [Treasury.gov.au]. Retrieved from Treasury.gov.au website: <https://treasury.gov.au/publication/economic-roundup-issue-4->

- 2012/australia-china-not-just-40-years
- BBC. (2021, September 15). UK, US and Australia Launch Pact to Counter China. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-58564837>
- Delanova, M. O. (2021). Dampak Pakta Pertahanan Trilateral Aukus Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(02), 259-285.
- Departement of Defence. (2016). *Defence white paper*. Australia Government Departement of Defence. <https://www.defence.gov.au/about/strategic-planning/defence-white-paper>
- Hadiwinata, B. S. (2017). Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hanggarini, P., & Banyu Perwita, A. A. (2024). Changes and Implications of Australia's Foreign and Defense Policy: A View from Indonesia. *Journal of Indo-Pacific Affairs*, 7 (6).
- Kevin, R., & Fitriani, E. (2025). Ketergantungan Australia di Bidang Pertahanan. *Indonesian Journal of International Relations*, 9 (1), 28-51.
- Korolev, A. (2023). Transisi dari lindung nilai ke penyeimbangan dalam kebijakan Australia terhadap Tiongkok: Eksplorasi teoritis dan empiris. *Australian Journal of International Affairs*, 77 (5), 548–568. <https://doi.org/10.1080/10357718.2023.2274446>
- Leonova, O. (2022). Dampak Kemitraan Strategis AUKUS terhadap Situasi Geopolitik di Kawasan Indo-Pasifik. *Jurnal Penelitian Politik*, (1), 68–75.
- Liu K. (2021). Chinese Influence in Australia: What Do Financial Markets Tell Us?. *East Asia* (Piscataway, N.J.), 38(1), 1–20. <https://doi.org/10.1007/s12140-020-09346-7>
- Mao, F. (2021, September 22). *Pakta pertahanan Aukus, pertarungan besar Australia di tengah panasnya hubungan AS - China*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58648456>
- Martin, L. (2021, September 17). Experts say China trade sanctions over AUKUS deal unlikely, but flag long-term concerns. Retrieved 28 04, 2025, from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2021-09-17/australia-aukus-subs-deal-unlikely-result-trade-sanctions/100469936>
- Moserby, P. (2023). *Tangkal Pengaruh China, Australia Tingkatkan Hubungan Pertahanan dengan Papua Nugini*. Papua Nugini: VOA. <https://www.voaindonesia.com/a/tangkal-pengaruh-china-australia-tingkatkan-hubungan-pertahanan-dengan-papua-nugini-/6916158.html>
- Nindya, A. P., & Abiyya, R. A. (2022). Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Sikap Indonesia [The Influence of AUKUS to Indo-Pacific Regional Stability and Indonesia's Stance]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1), 67-84.
- Oktavianto, F. (2023). *Implikasi AUKUS terhadap Hubungan Ekonomi Australia dan Tiongkok Tahun 2021–2022*. BHUVANA: Jurnal Studi Global, 5 (2), 131–148.

- Oktavianto, F. (2023). Implikasi AUKUS terhadap Hubungan Ekonomi Australia dan Tiongkok Tahun 2021-2022. *BHUVANA: Journal of Global Studies*, 1(2), 185-208.
- Oktavianto, F. (2023). Implikasi AUKUS terhadap Hubungan Ekonomi Australia dan Tiongkok Tahun 2021-2022. *BHUVANA: Journal of Global Studies*, 1(2), 185-208
- Sari, T. M., Djemat, Y. O., & Oktaviani, J. (2025). Kebijakan Australia Dalam Menghadapi Tiongkok Sebagai Kekuatan Baru Di Kawasan Asia Pasifik Tahun 2020-2023. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 2 (1).
- Tempo. Retrieved 28 04, 2025, <https://www.tempo.co/internasional/batal-ke-wto-australia-dan-cina-sepakat-selesaikan-sengketa-jelai-199107>
- Travel and Tour World. (2025). India Pecahkan Rekor dengan Melebihi Tiongkok dalam Lonjakan Visa Pelajar Australia 2025. Retrieved 28 04, 2025 <https://www.travelandtourworld.id/berita/artikel/india-shatters-records-by-surpassing-china-in-australian-student-visa-surge-2025/>